

Pengetahuan Peran Petugas Peran Pemerintah Terhadap Kepemilikan Jamban Keluarga Di Desa Patilereng Wilayah Kerja Puskesmas Bontosikuyu Kab.Kep.Selayar

Knowledge Role of Officers Role of Government on Family Latrine Ownership in Patilereng Village Working Area of Bontosikuyu Health Center Kab. Kep. Selayar

Muh. Mulyadi Nahr¹, Niken Kuswary², Hilmiah Nur³

^{1,2,3}Universitas Tamalatea Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Makassar

¹mulyadi1987@gmail.com

Abstract

Family latrines are effective waste disposal facilities to break the chain of disease transmission. The sewage is collected in a private or communal septic tank which must be located in the house itself. Efforts are being made to prevent the development of disease and to keep the environment clean and healthy by building latrines in every place of residence. Research Objectives To find out about knowledge, the role of officers, the role of the government on the ownership of family latrines in the Village of Patilereng, the working area of the Bontosikuyu Health Center, Selayar Islands Regency. The research method used is quantitative with a descriptive approach. The total population in the study was 268 families in the village of Patilereng. Determination of the sample using purposive sampling by determining the criteria for households that do not have a family latrine. the number of samples taken as many as 73 respondents. The results of the study were a total of 73 respondents who did not have a latrine, 76.7% of them had good knowledge and 23.3% had poor knowledge. of the total 73 respondents who did not have a latrine, 69.9% of them answered that the role of the officer was not good, and 30.1% answered that the role of the officer was good. % of them answered that the government's role was not good, and 27.4% answered that the government's role was good. The Conclusion, 72.6, while the role of officers and the role of the government is said to be still lacking but has provided participation in terms of increasing ownership of family latrines.

Keywords : *Knowledge, Role of Officers, Role of Government, Ownership of Family latrines*

Abstrak

Jamban keluarga adalah fasilitas pembuangan kotoran yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Kotoran ditampung dalam tangki septik pribadi atau komunal yang harus terdapat di dalam rumah sendiri. Upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya penyakit dan menjaga lingkungan menjadi bersih serta sehat dengan cara membangun jamban pada setiap tempat tinggal. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang Pengetahuan, Peran Petugas, Peran pemerintah terhadap kepemilikan Jamban keluarga di Desa Patilereng wilayah Kerja Puskesmas Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif. Jumlah populasi dalam penelitian yaitu 268 KK yang berada di Desa Patilereng. Penentuan Sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan menentukan Kriteria KK yang tidak memiliki Jamban keluarga . jumlah sampel yang diambil sebanyak 73 Responden. Hasil penelitian total 73 responden yang tidak memiliki jamban, 76,7% diantaranya memiliki pengetahuan yang baik dan 23,3% memiliki pengetahuan yang kurang. dari total 73 responden yang tidak memiliki jamban, 69,9% diantaranya memberi jawaban bahwa peran petugas kurang baik, dan 30,1% menjawab peran petugas sudah baik. dari total 73 responden yang tidak memiliki jamban, 72,6% diantaranya memberi jawaban bahwa peran pemerintah kurang baik, dan 27,4% menjawab peran pemerintah sudah baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat alaupun sudah dikatakan baik namun belum menjamin untuk

memiliki jamban keluarga, sedangkan peran petugas dan peran pemerintah alaupun dikatakan masih kurang namun telah memberikan peran serta dalam hal emingkatkan kepemilikan Jamban keluarga.

Kata kunci : Pengetahuan, Peran Petugas, Peran Pemerintah, Kepemilikan Jamban Keluarga

PENDAHULUAN

Kondisi Sanitasi yang masih kurang baik dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya berbagai penyakit yang dialami oleh masyarakat . hal ini terjadi karena masih banyaknya orang yang tidak memperdulikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari . sanitasi yang masih kurang baik menjadi tantangan yang besar untuk menggapai target yang diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk rumah tangga dengan akses sanitasi yang sesuai dan aman menjadi 90 persen.

Kepemilikan Jamban Keluarga merupakan salah satu item pada sanitasi dasar sehingga setiap keluarga sudah harus memiliki Jamban ,apabila cakupan kepemilikan jamban keluarga dimasyarakat masih sangat rendah maka akan sangat berpengaruh terhadap perilaku Masyarakat untuk melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal itu dapat menimbulkan pencemaran Lingkungan dan menjadi penyebaran penyakit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, mayoritas masyakarat telah memiliki jamban sehat yang bentuk konstruksinya leher angsa dan berada di dalam rumah. Ini tecermin dari proporsi penggunaan jamban sehat permanen (JSP) yang mencapai 72,3%. Sebanyak 18,5% keluarga di Indoensia telah menggunakan jamban semi permanen. Jamban tersebut belum menggunakan bangunan leher angsa, namun memiliki tutup dan letaknya berada dalam rumah.Sementara, masih ada 9,2% keluarga di Indonesia yang menggunakan jamban komunal. Artinya, jamban ini digunakan lebih dari satu keluarga.

Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 melaporkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki persentase Kelurahan/Desa yang melaksanakan Open Defecation Free (ODF) saat tahun 2019 sebesar 57,82 % dan yang keluarga yang menggunakan jamban keluarga sepanjang tahun 2019 sebesar 76,31 % % (Anonim 2020).

Sedangkan cakupan kepemilikan Jamban terendah pada Desa Patilereng sebanyak 138 rumah dari 268 rumah dengan presentase 48,50 %, kenaikan Cakupan kepemilikan Jamban terjadi dalam 1 tahun terakhir dimana pada Tahun 2020 mengalami penambahan 2 Unit di Dusun lansoga, namun masih terbilang rendah karena masih dibawah 50%. Berdasarkan Data world Bank Sanitasi Tahun 2020 mengatakan baha Target MDGS 80 % setiap Desa harus akses dan memilki Jamban Keluarga ,selain itu menurut Permenkes Nomor 39 tahun 2016 bahwa suksesnya program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga sebagian besar ditentukan oleh dukungan dan akuntabilitas lintas sektoral Terkait, khususnya pada indikator Jamban Keluarga/sehat bahwa setiap rumah mempunyai akses/memiliki Jamban keluarga/sehat (Kemenkes,RI 2016). Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui Bagaimana pengetahuan masyarakat, peran petugas,peran pemerintah dalam hal kepemilikan Jamban Keluarga melalui penelitian yang berjudul " Pengetahuan Peran Petugas Peran Pemerintah terhadap kepemilikan Jamban keluarga di Desa Patilereng wilayah Kerja Puskesmas Bontosikuyu Kab.Kepulauan Selayar " .

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan sosial, dan penelitian ini berfokus pada aspek-aspek tertentu dan menunjukkan hubungan antar berbagai variabel (Fadilah 2019).

Metode pengumpulan data menggunakan cara wawancara menggunakan kuesioner dan yang dilakukan peneliti secara langsung kepada responden. Wawancara dengan responden yang berada dalam rumah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Distribusi Gambaran Pengetahuan terhadap Kepemilikan Jamban Keluarga di Desa Patilereng Kab.Kep.Selayar Tahun.2023

Pengetahuan	f	%
Baik	56	76,7
Kurang Baik	17	23,3
Total	73	100

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan telah dilihat pada tabel Distribusi Gambaran Pengetahuan terhadap Kepemilikan Jamban Keluarga di desa Patilereng Tahun 2022 bahwa dari total 73 responden yang tidak memiliki jamban, 76,7% diantaranya memiliki pengetahuan yang baik dan 23,3% memiliki pengetahuan yang kurang dengan tingkat Pendidikan paling tinggi yaitu lulusan SD sebanyak 39,7% dan yang paling sedikit SMP sebesar 9,6%.

Tabel 4. 1

Distribusi Gambaran Peran Petugas terhadap Kepemilikan Jamban Keluarga di Desa Patilereng Kab.Kep.Selayar Tahun.2023

Peran Petugas	f	%
Baik	22	30,1
Kurang Baik	51	69,9
Total	73	100

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peran Petugas Kesehatan di desa Patilereng terhadap kepemilikan Jamban Keluarga dapat dilihat dari tabel distribusi gambaran peran petugas terhadap kepemilikan jamban Keluarga di desa Patilereng di dapatkan hasil bahwa dari total 73 responden yang tidak memiliki jamban, 69,9% diantaranya memberi jawaban bahwa peran petugas kurang baik, dan 30,1% menjawab peran petugas sudah baik. Tingginya jumlah responden yang mengatakan bahwa peran atau dukungan petugas masih kurang, mengartikan bahwa petugas tidak membantu dalam hal pengadaan Jamban Keluarga menggunakan dana dari puskesmas, masih banyak juga responden yang tidak mendapatkan penyuluhan berkelompok pada Dusun terjauh di Desa

Patilereng yatu Lalemang dan reayya,karena penyuluhan biasanya selalu berpusat di Kantor Desa saja yang terletak di Dusun Lembang Jaya ,kegiatan ini juga hanya di hadiri oleh beberapa Tokoh masyarakat saja sehingga masyarakat yang berada di dusun terjauh kurang mendapatkan pelayanan Kesehatan dalam hal ini penyuluhan tentang jamban. Selebihnya beberapa responden telah mendapatkan dukungan dari petugas Kesehatan seperti pemantauan dan pengawasan jamban keluarga walaupun frekuensinya masih kurang.

Tabel 4. 2
Distribusi Gambaran Peran Pemerintah terhadap Kepemilikan Jamban Keluarga di Desa Patilereng Kab.Kep.Selayar Tahun 2023

Peran Pemerintah	f	%
Baik	20	27,4
Kurang Baik	53	72,6
Total	73	100

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat dari Tabel distribusi gambaran peran pemerintah terhadap kepemilikan jamban, di dapatkan hasil bahwa dari total 73 responden yang tidak memiliki jamban, 72,6% diantaranya memberi jawaban bahwa peran pemerintah kurang baik, dan 27,4% menjawab peran pemerintah sudah baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan masyarakat yang ada di desa Patilereng sudah dikatakan baik namun walaupun pengetahuan mereka sudah dikatakan baik namun belum tentu mereka menggunakan/memiliki Jamban keluarga hal ini dikarenakan masih kurangnya fasilitas serta factor ekonomi yang kurang mendukung,ketersediaan lahan,dan juga Sarana Air Bersih. Sehingga pengetahuan yang baik saja tidak cukup untuk untuk meningkatkan kepemilikan Jamban Keluarga namun perlu keyakinan dan kemauan dari masyarakat itu sendiri.
2. Peran Petugas Kesehatan dalam hal meningkatkan kepemilikan Jamban Keluarga masih terbilang kurang karena masih ada beberapa masyarakat yang masih kurang mendapatkan
3. informasi/ mengenai penyuluhan Khususnya Jamban keluarga di Dusun Yang sulit dijangkau,dan kurang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Peran pemerintah di desa Patilereng dikatakan masih kurang ,karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah khususya di dusun Lalemang.

Saran

1. Pemerintah Desa Patilereng
Disarankan kepada pemerintah jika membuat program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal peningkatan kepemilikan Jamban Keluarga agar melibatkan lebih banyak masyarakat lagi tidak hanya berfokus pada satu Dusun saja,serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan petugas Kesehatan yakni petugas Sanitarian terkait Puskesmas terkait pendistribusian bantuan Jamban keluarga yang memenuhi syarat Kesehatan.

2. Petugas Kesehatan Puskesmas

Petugas puskesmas diharapkan agar jika memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki Jamban dilakukan disemua Dusun bukan hanya di kantor Desa,serta melibatkan tokoh masyarakat maupun kader Kesehatan yang ada di Desa.

3. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat harus mendukung jika ada pemberdayaan masyarakat dari pemerintah tidak selalu bergantung pada subsidi pemerintah dan harus mandiri demi mencapai Kesehatan yang yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2020. "Profil." *Profil Dinas Kesehatan Prov.Sulsel* 11-16. doi: 10.1007/978-3-642-94500-7_1.
2. Fadilah, Eri Rezkiyanti. 2019. "Pengaruh Pendampingan Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar." 1(69):5-24.
3. Kemenkes RI, Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014*. Vol. 39.